

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) merepresentasikan segmen populasi perempuan yang mengemban peran ganda substansial dalam tatanan rumah tangga. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan urusan domestik, melainkan juga berperan sebagai penopang ekonomi utama keluarga. Posisi ini kerap menempatkan mereka dalam situasi yang kompleks, menuntut keseimbangan antara tanggung jawab rumah tangga dan perjuangan keras dalam mencari sumber pendapatan demi keberlangsungan hidup keluarga. Kondisi ini umumnya timbul akibat perceraian, kematian pasangan, penelantaran, atau ketika pasangan mengalami sakit berkepanjangan yang menghambat kemampuan bekerja. Bahkan, tidak jarang perempuan lajang yang belum menikah harus mengambil alih tanggung jawab sebagai kepala keluarga karena berbagai pertimbangan sosial maupun ekonomi (Celves, 2024). Oleh karena itu, eksistensi PEKKA bukan sekadar fenomena individual, melainkan telah berkembang menjadi isu struktural yang memerlukan atensi serius dari masyarakat maupun pemerintah.

Fenomena peningkatan jumlah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan telah menarik perhatian berbagai kalangan. Widi (2023) mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah PEKKA dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh dinamika sosial yang kian kompleks, mencakup peningkatan angka perceraian, urbanisasi, serta migrasi tenaga kerja laki-laki ke luar daerah atau luar negeri, yang pada gilirannya mendorong perempuan untuk mengambil alih

tanggung jawab rumah tangga. Kondisi ini menegaskan bahwa perempuan memegang peranan krusial, tidak hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga dalam pembangunan sosial dan ekonomi pada tingkat masyarakat. Kendati demikian, peran signifikan yang diemban oleh perempuan kepala keluarga seringkali tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya yang memadai. Akibatnya, mereka harus menghadapi beragam keterbatasan, mulai dari akses pendidikan dan keterampilan yang rendah, hingga hambatan struktural dalam memperoleh kesempatan ekonomi.

Data empiris semakin memperkuat gambaran tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2022, proporsi rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan mencapai 12,72% dari total keseluruhan rumah tangga di Indonesia (BPS, 2022, hlm. 15). Angka ini menunjukkan bahwa fenomena PEKKA bukanlah kasus sporadis, melainkan telah menjadi realitas sosial yang cukup signifikan. Namun, besarnya angka tersebut belum berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan mereka. Penelitian Yayasan PEKKA mengemukakan bahwa sekitar 95% perempuan kepala keluarga bekerja di sektor informal, seperti perdagangan kecil, pertanian tradisional, serta pekerjaan kasar yang minim perlindungan sosial. Bahkan, hampir separuh dari mereka hanya mampu memperoleh penghasilan kurang dari Rp500.000 per bulan (Yayasan PEKKA, 2014, hlm. 44). Fakta ini menggarisbawahi bahwa PEKKA merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kemiskinan, sehingga memerlukan intervensi serius melalui program pemberdayaan yang sistematis dan berkelanjutan.

Upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut diwujudkan melalui kebijakan formal, salah satunya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Rumahang. Regulasi ini menekankan urgensi pemberdayaan perempuan, khususnya yang berkarya di sektor informal, melalui pengembangan industri rumahang sebagai sumber pendapatan alternatif. Tujuan regulasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga, sekaligus mendorong kemandirian masyarakat (Kementerian PPPA RI, 2016, hlm. 4). Selain pemerintah, Yayasan PEKKA (2020) sebagai mitra strategis turut mengimplementasikan berbagai program pendampingan dengan jangkauan hingga 34 provinsi, termasuk Kalimantan Selatan. Program-program tersebut meliputi pelatihan keterampilan, penguatan organisasi kelompok perempuan, serta fasilitasi akses terhadap modal dan jaringan pasar. Dengan demikian, terlihat adanya dukungan kebijakan dan kelembagaan yang cukup solid untuk memperkuat peran PEKKA dalam pembangunan ekonomi.

Berdasarkan data Pemutakhiran Data Keluarga (2023), di Kabupaten Hulu Sungai Utara tercatat sebanyak 518 perempuan kepala keluarga yang terhimpun dalam 27 kelompok PEKKA. Secara kuantitatif, angka ini mengindikasikan potensi besar bagi penguatan ekonomi keluarga maupun pembangunan desa. Namun, meskipun terdapat dukungan kebijakan dan potensi yang signifikan, realitas di lapangan, khususnya di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, menunjukkan adanya beberapa tantangan substansial yang menghambat efektivitas program pemberdayaan PEKKA.

Berdasarkan hasil observasi fenomena-fenomena yang penulis temukan di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, antara lain sebagai berikut:

1. Menurunnya antusias anggota kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam kegiatan Pelatihan yang diberikan oleh pendamping dan juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai manfaat dan relevansi dari pelatihan tersebut. Hal ini disebabkan karena para anggota kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga lebih mementingkan kesibukan masing-masing dibandingkan kepentingan kelompok. Contohnya: Para anggota kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang telah diberikan tugas untuk mengembangkan Usaha Kecil Mikro (UKM) tidak bisa fokus disebabkan karena masih banyaknya kegiatan sehari-hari di lingkungan rumah para anggota Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), seperti: mengurus kebutuhan rumah tangga, mengurus kebutuhan anak-anaknya, mengurus lahan pertanian, serta hal lainnya seperti anggota merasa kurangnya kelanjutan dan dukungan pasca-pelatihan untuk membantu anggota menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka peroleh.
2. Belum adanya kegiatan pemasaran atas hasil karya Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. karena anggota kelompok belum memiliki akses dan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan menjangkau pasar yang lebih luas. Hal itu terlihat dari hasil karya kelompok dalam bentuk anyaman kerajinan, belum bisa dipasarkan. Contohnya: Hasil karya Kelompok berupa anyaman

kerajinan belum tersebar ke setiap wilayah di Kota karena masih minimnya pasar yang menerima hasil karya Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “ **Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara** “.penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menilai dan mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang dilaksanakan oleh PEKKA di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam berbagai faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif dan komprehensif untuk perbaikan dan pengembangan program yang lebih efektif sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup perempuan kepala keluarga serta memperkuat peran mereka dalam pembangunan desa secara berkelanjutan.

B. Fokus Penelitian

Adapun Penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara” Penelitian ini menggunakan tiga variabel utama efektivitas organisasi Richard M. Steers yaitu :

1. Pencapaian tujuan program;
2. Efisiensi penggunaan sumber daya;
3. Responsivitas terhadap kebutuhan anggota dan kondisi lingkungan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Desa Kayakah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas program pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Desa Kayakah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Secara teoritis, memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya pada bidang pemberdayaan perempuan kepala keluarga dan efektivitas program pemberdayaan masyarakat.
2. Secara praktis, dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, pendamping program, dan anggota kelompok PEKKA dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Desa Kayakah.